



Judul : Seleksi Anggota BPK DPR Diminta Pilih Calon Berintegritas
Tanggal : Jumat, 21 Juni 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Seleksi Anggota BPK DPR Diminta Pilih Calon Berintegritas

KOMISI XI DPR bakal menggelar seleksi calon anggota BPK periode 2024-2029. Masa pendaftaran dimulai kemarin dan akan berlangsung hingga 4 Juli mendatang. Senayan diingatkan untuk memilih calon berintegritas, jauh dari perilaku korupsi.

Pengamat politik dan kebijakan publik Ray Rangkuti mengatakan, BPK berperan penting dalam menghitung angka kerugian negara di kasus korupsi. Hingga sangat mungkin ada kelompok kepentingan menyusupkan calon ke lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Tindak pidana korupsi itu kan jejaring. Makanya, mereka harus bisa merangsek ke semua sektor yang berhubungan dengan pengendalian keuangan negara, salah satunya BPK," ujar Ray kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Ray mencontohkan, korupsi proyek base transceiver station (BTS) jaringan 4G. Kasus korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun itu juga menyisakan kasus suap kepada mantan anggota BPK, Achsanul Qosasi.

Karenanya, sambung Pendiri Lingkar Madani (LJMA) Indonesia ini, ada kemungkinan pemain BTS mencoba memasukkan 'jago' dalam seleksi calon anggota BPK. "BTS itu kasus besar. Bisa saja, ada yang berkepentingan agar anggota BPK dapat dikendalikan," cetusnya.

Lebih lanjut, Ray meminta panitia seleksi (pansel) calon anggota BPK bentukan Komisi XI DPR mencari berbagai informasi tentang kandidat yang mendaftar. Menurut dia, pansel harus berani bertindak tegas dalam menyeleksi calon yang diduga bermasalah.

"Terpenting, pansel harus berani dan tegas. Kalau mendingar informasi negatif tentang calon, nggak perlu ragu-ragu untuk mencoretnya," pintanya.

Sebab, lanjut dia, calon anggota BPK tak sekadar harus memenuhi persyaratan administratif, tapi harus berintegritas. "Itu mencakup semua, yang bersangkutan (peserta seleksi) itu tidak sedang mengemban kepentingan,

dekat kelompok oligarki, dan dipastikan nggak akan menimbulkan masalah," tandasnya.

Senada, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman juga mengendus adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu menyelundupkan kandidat dalam seleksi calon anggota BPK. Dia juga memberi peringatan, agar calon anggota BPK yang akan dipilih bukan pencari kerja alias job seeker.

"Hal pertama yang perlu diperhatikan oleh panitia pendaftaran dan masyarakat dalam proses seleksi calon anggota BPK ialah integritas. Kemarin kita sudah mendapat pelajaran beragam dari kasus Achsanul Qosasi, penyevelan ruang kerja Pak Pius (Pius Lustrilang, red), dan kasus di Kementerian Pertanian," ujar Boyamin.

Achsanul merupakan mantan anggota BPK yang terjerat kasus korupsi proyek BTS untuk jaringan 4G. Sementara, Pius merupakan anggota BPK yang ruang kerjanya disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso.

Boyamin menegaskan, kasus suap yang menyeret auditor maupun anggota BPK menunjukkan adanya integritas yang buruk. Karenanya, ada kemungkinan calon selundupan dari pihak-pihak tertentu, yang akan memanfaatkan BPK untuk menutupi berbagai penyimpangan dan korupsi.

"Saya menengarai ada selundupan-selundupan, penyusupan untuk memanfaatkan BPK demi melindungi orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dari dugaan penyimpangan-penyimpangan," katanya.

Namun, Boyamin belum menyebut calon titipan yang berpotensi diselundupkan ke BPK. Soal adanya politikus yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPK, dia mengingatkan, kandidat tersebut harus memiliki integritas dan kemampuan yang teruji. "Misalnya, teruji itu namanya tidak pernah disebut oleh KPK, termasuk dipanggil sebagai saksi dan segala macam," tambahnya. ■ KAL